

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 293-302
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18114920>

Manajemen Kewirausahaan Islam di Era Globalizes: Tinjauan Konseptual atas Pengalaman Indonesia dan Eropa

Islamic Entrepreneurship Management in the Era of Globalization: A Conceptual Review of the Experiences of Indonesia and Europe

Sugiharto, Ananda Syafa, Azizah, A. Fauzan, Naufal Dzaky, M. Nifal, M. Nurul

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
Email: anandasyafa94@gmail.com

Abstract

The conditions of entrepreneurial management in Indonesia and Europe show different but complementary dynamics in the context of modern business development. In Indonesia, entrepreneurship management is developing rapidly, driven by the growth of MSMEs, increased digital literacy, and government support through various incubation programs and access to financing. However, challenges remain in terms of management professionalization, long-term access to capital, and technological adaptability. Meanwhile, European countries generally have more established entrepreneurship management systems, characterized by strong innovation ecosystems, stable business regulations, and a strong research and development culture. Europe also excels in the implementation of sustainable management and the integration of Industry 4.0 technologies. A comparison of the two regions shows that Indonesia has significant potential through market growth and creative human resources, while Europe stands out for its mature and innovative management structures. Therefore, collaboration and knowledge exchange between the two regions have the potential to create more adaptive, innovative, and globally competitive entrepreneurship models.

Keywords : *Entrepreneurship, Innovation, Management*

Abstrak

Kondisi manajemen kewirausahaan di Indonesia dan Eropa menunjukkan dinamika yang berbeda namun saling melengkapi dalam konteks pengembangan bisnis modern. Di Indonesia, manajemen kewirausahaan berkembang pesat didorong oleh pertumbuhan UMKM, peningkatan literasi digital, dan dukungan pemerintah melalui berbagai program inkubasi serta akses pembiayaan. Namun, tantangan tetap ada dalam aspek profesionalisasi manajemen, akses modal jangka panjang, dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi. Sementara itu, negara-negara Eropa umumnya memiliki sistem manajemen kewirausahaan yang lebih mapan, ditandai dengan ekosistem inovasi yang kuat, regulasi bisnis yang stabil, dan budaya riset-pengembangan yang tinggi. Eropa juga unggul dalam penerapan manajemen berkelanjutan serta integrasi teknologi industri 4.0. Perbandingan kedua kawasan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar melalui pertumbuhan pasar dan sumber daya manusia kreatif, sedangkan Eropa menonjol dalam struktur manajemen yang matang dan inovatif. Dengan demikian, kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara kedua kawasan berpotensi menciptakan model kewirausahaan yang lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing global.

Kata Kunci : *Kewirausahaan, Inovasi, Manajemen*

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 01 January 2026

PENDAHULUAN

Manajemen kewirausahaan menempati posisi yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara karena berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing nasional. Dalam konteks ekonomi global yang terus mengalami perubahan cepat, kewirausahaan tidak lagi dipahami sebatas aktivitas membuka usaha, tetapi sebagai proses sistematis yang menuntut kemampuan pengelolaan, inovasi, serta pengambilan keputusan yang tepat. Perubahan pola konsumsi, kemajuan teknologi, dan meningkatnya intensitas persaingan global mendorong setiap negara untuk membangun sistem manajemen kewirausahaan yang adaptif dan Barrientos jangka panjang.

Globalisasi ekonomi telah memperluas ruang persaingan bagi pelaku usaha di berbagai negara. Arus barang, jasa, modal, dan informasi yang semakin terbuka menuntut pelaku usaha untuk memiliki kemampuan manajerial yang lebih profesional agar mampu bertahan dan berkembang. Dalam kondisi tersebut, kualitas manajemen kewirausahaan menjadi faktor penentu keberhasilan suatu usaha, baik pada skala kecil, menengah, maupun besar. Negara yang mampu membangun ekosistem kewirausahaan dengan manajemen yang kuat cenderung lebih siap menghadapi tantangan ekonomi global dibandingkan negara yang masih mengandalkan pendekatan tradisional dalam pengelolaan usaha.

Indonesia dan negara-negara Eropa merupakan dua kawasan yang memiliki karakteristik kewirausahaan yang berbeda, baik dari segi struktur ekonomi, latar belakang sosial budaya, maupun tingkat kemajuan industri. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi kewirausahaan yang sangat besar, terutama didukung oleh jumlah penduduk usia produktif yang tinggi serta dominasi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional. Di sisi lain, negara-negara Eropa umumnya telah mencapai tahap kematangan ekonomi dengan sistem kewirausahaan yang lebih terstruktur dan terintegrasi dalam kebijakan pembangunan nasional.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan kewirausahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. UMKM berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong pertumbuhan kewirausahaan melalui berbagai kebijakan, seperti penyediaan akses permodalan, kemudahan perizinan usaha, program pendampingan, serta dukungan terhadap digitalisasi usaha. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong munculnya wirausaha baru di berbagai sektor ekonomi.

Meskipun demikian, perkembangan kewirausahaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan manajerial. Banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, masih menghadapi keterbatasan dalam hal perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi. Praktik manajemen yang belum profesional menyebabkan sebagian usaha sulit berkembang dan rentan terhadap perubahan pasar. Selain itu, rendahnya literasi keuangan dan manajerial juga menjadi kendala utama dalam meningkatkan daya saing usaha di tingkat nasional maupun internasional.

Di tengah upaya percepatan transformasi digital, tantangan manajemen kewirausahaan di Indonesia semakin kompleks. Digitalisasi membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi, namun pada saat yang sama menuntut kemampuan manajerial dan adaptasi teknologi yang tidak semua pelaku usaha miliki. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kewirausahaan di Indonesia tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kualitas manajemen agar usaha yang dijalankan mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Berbeda dengan Indonesia, negara-negara Eropa umumnya telah memiliki ekosistem kewirausahaan yang lebih stabil dan matang. Lingkungan bisnis di Eropa didukung oleh regulasi yang jelas dan konsisten, sistem pendidikan yang menanamkan nilai kewirausahaan sejak dini, serta infrastruktur ekonomi yang memadai. Pendidikan kewirausahaan di kawasan Eropa tidak hanya berorientasi pada penciptaan usaha baru, tetapi juga pada pengembangan kompetensi manajerial, kepemimpinan, serta kemampuan inovasi berbasis riset dan teknologi. Keunggulan lain dari manajemen kewirausahaan di Eropa terletak pada kuatnya keterkaitan antara dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pusat riset. Inovasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, orientasi kewirausahaan di Eropa cenderung mengedepankan keberlanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pendekatan ini menjadikan manajemen kewirausahaan di Eropa lebih sistematis dan berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang.

Perbedaan kondisi antara Indonesia dan Eropa menunjukkan bahwa masing-masing kawasan memiliki keunggulan dan keterbatasan dalam pengelolaan kewirausahaan. Indonesia memiliki keunggulan dari sisi potensi pasar domestik yang besar, fleksibilitas usaha, serta kecepatan adaptasi terhadap teknologi digital. Sebaliknya, Eropa unggul dalam hal kematangan sistem manajemen, stabilitas kebijakan, serta pemanfaatan inovasi berbasis riset. Perbedaan ini membuka peluang untuk saling belajar dan mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan kewirausahaan. Oleh karena itu, kajian perbandingan manajemen kewirausahaan antara Indonesia dan negara-negara Eropa menjadi penting untuk dilakukan secara mendalam. Melalui analisis perbandingan ini, dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan manajemen kewirausahaan di masing-masing kawasan. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis, khususnya dalam merumuskan strategi penguatan manajemen kewirausahaan di Indonesia.

Dengan mengadaptasi praktik terbaik yang diterapkan di Eropa dan menyesuaikannya dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia, penguatan manajemen kewirausahaan diharapkan mampu meningkatkan daya saing usaha nasional. Pada akhirnya, manajemen kewirausahaan yang kuat dan berkelanjutan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global yang semakin ketat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai strategi utama dalam menggali dan menganalisis data. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan berupaya memahami secara komprehensif dinamika, konsep, serta praktik manajemen kewirausahaan yang berkembang di Indonesia dan Eropa. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah berbagai perspektif teoretis dan empiris yang tertuang dalam literatur ilmiah guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan, persamaan, serta kecenderungan pengelolaan kewirausahaan di kedua kawasan. Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder, yang diperoleh dari berbagai referensi tertulis yang relevan dengan topik kajian. Literatur yang digunakan meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku teks akademik, hasil penelitian terdahulu, prosiding ilmiah, serta laporan resmi yang diterbitkan oleh lembaga nasional maupun internasional. Selain itu, publikasi dari organisasi global yang memiliki otoritas dalam bidang ekonomi, kewirausahaan, dan pembangunan juga dimanfaatkan untuk memberikan konteks kebijakan dan gambaran makro mengenai perkembangan kewirausahaan di Indonesia dan Eropa. Pemanfaatan beragam sumber ini dimaksudkan untuk memperkaya sudut pandang analisis serta menghindari ketergantungan pada satu jenis referensi tertentu.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan memanfaatkan berbagai basis data akademik daring, seperti Google Scholar, JSTOR, ResearchGate, dan Scopus. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan manajemen kewirausahaan, pengembangan UMKM, ekosistem bisnis, inovasi dan teknologi, pendidikan kewirausahaan, serta kebijakan pemerintah di Indonesia dan Eropa. Literatur yang berhasil dihimpun kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi terhadap fokus penelitian, kredibilitas penerbit, serta kedalaman pembahasan mengenai aspek manajerial dan kelembagaan kewirausahaan. Sebagian besar sumber yang digunakan berasal dari publikasi sepuluh tahun terakhir agar data yang dianalisis tetap kontekstual dengan perkembangan terkini, meskipun beberapa referensi klasik tetap dipertahankan sebagai dasar konseptual apabila masih memiliki relevansi yang kuat. Setelah proses pengumpulan dan seleksi literatur, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji dokumen secara sistematis, kritis, dan terstruktur. Dalam tahap ini, setiap sumber dibaca secara cermat untuk mengidentifikasi gagasan utama, konsep kunci, serta temuan-temuan penting yang berkaitan dengan manajemen kewirausahaan. Informasi yang diperoleh kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema besar, seperti

pengelolaan usaha, akses terhadap pembiayaan, pemanfaatan teknologi dan inovasi, peran kebijakan pemerintah, serta kontribusi pendidikan dan budaya kewirausahaan. Pengelompokan tema ini memudahkan peneliti dalam melakukan perbandingan antara praktik kewirausahaan di Indonesia dan Eropa secara lebih sistematis.

Proses analisis selanjutnya dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang paling relevan dan signifikan, sehingga data yang dianalisis menjadi lebih terfokus dan terarah. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan komparatif untuk menggambarkan kondisi manajemen kewirausahaan di masing-masing kawasan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan-temuan penelitian dengan kerangka teoretis yang digunakan, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan terintegrasi. Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis literatur, baik jurnal ilmiah, buku akademik, maupun laporan resmi, guna memastikan konsistensi dan kesesuaian temuan. Selain itu, verifikasi silang juga dilakukan dengan memanfaatkan data statistik dan laporan institusional sebagai pendukung analisis. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai.

Melalui penerapan metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang objektif, mendalam, dan komprehensif mengenai manajemen kewirausahaan di Indonesia dan Eropa. Selain memberikan kontribusi pada pengembangan kajian akademik, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual bagi pengambil kebijakan, akademisi, serta praktisi dalam merumuskan strategi penguatan manajemen kewirausahaan yang adaptif dan berdaya saing di tingkat global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Manajemen Kewirausahaan Islam

Manajemen kewirausahaan Islam merupakan pendekatan pengelolaan usaha yang berlandaskan nilai-nilai syariah, seperti tauhid, keadilan ('adl), amanah, kejujuran (shiddiq), dan tanggung jawab sosial. Berbeda dengan kewirausahaan konvensional yang berorientasi utama pada profit, kewirausahaan Islam menempatkan keuntungan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) dan keberkahan usaha. Dalam perspektif Islam, manajemen kewirausahaan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Praktik seperti larangan riba, gharar, dan maysir menjadi batas etis dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan demikian, kewirausahaan Islam tidak hanya menuntut efisiensi dan inovasi, tetapi juga integritas moral dan kepedulian sosial. Globalisasi membawa peluang sekaligus tantangan bagi kewirausahaan Islam. Integrasi pasar global, perkembangan teknologi digital, dan mobilitas modal lintas negara membuka akses pasar yang lebih luas. Namun, di sisi lain, globalisasi juga mendorong persaingan ketat, standar bisnis internasional, serta dominasi sistem ekonomi konvensional yang sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah. Kewirausahaan Islam dituntut untuk adaptif tanpa kehilangan identitas nilai. Tantangan utama meliputi standardisasi produk halal, inovasi model bisnis syariah, serta kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital secara etis. Di sinilah manajemen kewirausahaan Islam berperan penting dalam menyeimbangkan antara tuntutan global dan komitmen keislaman.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan kewirausahaan Islam. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa kewirausahaan Islam berkembang pesat di sektor UMKM halal, seperti industri makanan halal, fesyen Muslim, pariwisata halal, dan keuangan syariah. Dari sisi manajemen, kewirausahaan Islam di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendekatan komunitas dan nilai gotong royong. Lembaga keuangan mikro syariah, pesantren entrepreneur, serta inkubator bisnis halal menjadi contoh penerapan

manajemen kewirausahaan Islam yang menggabungkan nilai religius dan praktik bisnis modern. Namun demikian, tantangan masih terlihat pada aspek profesionalisme manajemen, akses modal global, dan peningkatan daya saing internasional. Berbeda dengan Indonesia, kewirausahaan Islam di Eropa berkembang dalam konteks minoritas Muslim. Di berbagai negara Eropa, kewirausahaan Islam lebih banyak muncul sebagai respon terhadap kebutuhan identitas, integrasi sosial, dan ekonomi komunitas Muslim. Sektor yang dominan meliputi industri halal, layanan keuangan syariah, serta bisnis berbasis etika (*ethical business*). Pengalaman Eropa menunjukkan bahwa manajemen kewirausahaan Islam cenderung adaptif dan inovatif. Pelaku usaha Muslim di Eropa sering mengintegrasikan prinsip syariah dengan regulasi bisnis lokal dan nilai universal seperti keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kewirausahaan Islam dapat bersifat inklusif dan relevan dalam sistem ekonomi global yang plural.

Secara konseptual, perbedaan konteks sosial dan budaya antara Indonesia dan Eropa memengaruhi praktik manajemen kewirausahaan Islam. Indonesia unggul dalam basis pasar dan dukungan kultural-religius, sementara Eropa unggul dalam inovasi, tata kelola bisnis modern, dan orientasi global. Persamaan keduanya terletak pada upaya menjaga prinsip syariah di tengah dinamika globalisasi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa manajemen kewirausahaan Islam bersifat fleksibel dan kontekstual, namun tetap berpijak pada nilai-nilai dasar Islam. Dengan saling belajar, Indonesia dapat meningkatkan standar manajemen dan *global competitiveness*, sementara Eropa dapat memperkuat basis komunitas dan nilai spiritual kewirausahaan. Tinjauan atas pengalaman Indonesia dan Eropa memberikan implikasi bahwa manajemen kewirausahaan Islam perlu dikembangkan sebagai model alternatif ekonomi global yang beretika, inklusif, dan berkelanjutan. Integrasi nilai syariah dengan praktik manajemen modern menjadi kunci keberhasilan kewirausahaan Islam di era globalisasi. Selain itu, penguatan pendidikan kewirausahaan Islam, dukungan kebijakan publik, serta kolaborasi lintas negara menjadi strategi penting untuk memperluas peran kewirausahaan Islam di tingkat global.

Tantangan Dalam Implementasi Syari'ah Digital

Salah satu tantangan utama dalam mengembangkan ekonomi Syariah adalah kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang teknologi digital dan kewirausahaan yang sesuai dengan Syariah. Banyak orang dan bisnis masih belum memiliki pengetahuan finansial dan teknologi untuk memanfaatkan potensi industri ini. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk mengakses dan menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Syariah. Minat masyarakat dalam menggunakan layanan fintech yang sesuai dengan hukum Syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dan pengetahuan mereka tentang hukum Syariah, menurut beberapa penelitian. Namun, hambatan utama untuk keterlibatan masyarakat yang lebih luas adalah kurangnya pengetahuan ini (Kurniawan, 2024). Oleh karena itu, untuk menginformasikan masyarakat umum tentang manfaat teknologi digital dan kewirausahaan yang sesuai dengan Syariah, diperlukan kampanye pendidikan yang lebih kuat. Masyarakat tidak akan mampu mengoptimalkan keuangan mereka melalui penggunaan teknologi digital seperti e-commerce dan platform yang sesuai dengan Syariah jika mereka tidak memiliki cukup informasi untuk membuat keputusan yang tepat. Di daerah terpencil, di mana informasi langka dan pelatihan kurang memadai, kurangnya dukungan ini bahkan lebih parah. Untuk memaksimalkan potensi ekonomi Syariah dan mendorong partisipasi publik yang lebih besar, peningkatan literasi keuangan dan digital sangat penting.

Kedua, menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip Syariah menjadi lebih sulit karena perkembangan teknologi dan inovasi yang pesat dalam model bisnis digital. Dalam hal produk dan layanan digital, bank-bank Islam menghadapi tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum Syariah. Meskipun teknologi digital berpotensi meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan, lembaga keuangan Islam seringkali mengalami kesulitan ketika mencoba mengintegrasikan fintech dan blockchain ke dalam sistem dan protokol mereka saat ini. Hal ini menyulitkan untuk memasukkan teknologi baru tanpa menimbulkan masalah dengan hukum Syariah.

Ketiga, model bisnis tradisional memiliki pijakan yang kuat di pasar dan terus memberikan persaingan yang ketat bagi industri Islam. Modal, sumber daya manusia, dan jaringan distribusi adalah area di mana bank-bank tradisional seringkali unggul. Meskipun bank-bank Islam memiliki rasio kredit macet dan pengembalian aset (ROA) yang lebih baik, bank-bank konvensional terus mendominasi pasar dalam hal total aset dan jumlah cabang (Sari, 2024).

Strategi Untuk Mengatasi Tantangan

Agar kewirausahaan Islami dapat berkembang di era digital modern, program pendidikan dan literasi harus diprioritaskan. Terdapat sejumlah inisiatif yang bertujuan untuk mendidik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tentang Syariah dengan cara yang menumbuhkan semangat kewirausahaan yang sesuai dengan teknologi, meningkatkan keterampilan digital, dan memberikan peserta akses ke berbagai alat digital. Topik yang dibahas dalam materi pelatihan meliputi etika dan prinsip bisnis Islam, strategi pemasaran digital yang sesuai dengan hukum Syariah, dan proses untuk mendapatkan sertifikasi yang disetujui oleh Syariah. Selain itu, terdapat program pendidikan berkelanjutan dan penyuluhan yang berupaya meningkatkan literasi dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan digital yang sesuai dengan hukum Syariah. Pengembangan ekonomi Syariah terhambat oleh kesenjangan yang sudah lama ada antara literasi digital dan literasi keuangan yang sesuai dengan Syariah; oleh karena itu, langkah ini sangat penting. Untuk membantu masyarakat umum memahami dan menerapkan prinsip-prinsip bisnis berbasis hukum Islam, platform pendidikan seperti Pusat Pengetahuan Syariah (SKC) memfasilitasi pertukaran ide, informasi, dan kerja sama dalam ekonomi Syariah (Kurniawan, 2024).

Para ahli pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi Islam perlu menguasai teori ekonomi Islam serta konsep dan praktik teknologi modern. Untuk beradaptasi dengan lanskap digital yang terus berubah, investasi dalam pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia secara berkelanjutan sangat penting. Tujuannya adalah membangun lingkungan Islam yang kuat dan berkelanjutan bagi para pengusaha melalui program pendidikan dan literasi publik. Para politisi telah memperhatikan fakta bahwa regulasi ekonomi Islam telah berkembang untuk mengakomodasi teknologi modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam. Hukum perbankan Islam yang memungkinkan transformasi digital secara aktif dipromosikan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Infrastruktur TI yang kuat dan teratur telah dibangun berkat kebijakan ini, yang pada gilirannya telah membantu negara menjadi lebih adaptif dan fleksibel (Hasanah, 2024).

Dengan menguraikan pedoman khusus untuk pengembangan barang dan jasa keuangan, kebijakan yang mendorong perluasan fintech Islam membantu menumbuhkan suasana yang kondusif bagi perluasannya. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya platform keuangan Islam, skema crowdfunding yang sesuai dengan hukum Syariah, dan pemanfaatan teknologi blockchain, yang mendorong solusi keuangan yang adil dan efisien (Hakim, 2024). Dengan bantuan kebijakan komprehensif seperti Kerangka Tata Kelola Syariah (SGF), UU Perbankan Islam, dan UU Perbankan dan Lembaga Keuangan, Malaysia telah mampu mengembangkan regulasi fintech yang sesuai dengan Syariah (Pramesti, 2024). Lembaga keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan mendorong inovasi dalam produk dan layanan didorong untuk didirikan di bawah kerangka peraturan yang ketat dan terorganisir ini. Dengan mengesahkan undang-undang yang sesuai, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran, meningkatkan infrastruktur, dan mempercepat laju inovasi keuangan yang sesuai dengan hukum Syariah.

Membangun ekonomi digital Indonesia yang sesuai dengan hukum Syariah juga membutuhkan kerja sama lintas industri. Untuk membangun lanskap bisnis yang terintegrasi dan sesuai dengan Syariah dalam jangka panjang di seluruh rantai pasokan negara, pemerintah mendorong kerja sama di antara semua pihak terkait. Hal ini dibuktikan dengan kolaborasi antara KNEKS, MES, IAEI, dan DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang menjadi pengingat akan hal ini. Ekosistem Islam, yang terdiri dari lembaga keuangan Islam, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia,

dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah salah satu dari beberapa program praktis yang muncul dari implementasi kemitraan ini. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah ke produk dan layanan keuangan Islam berkat upaya digitalisasi sistem pembayaran, peningkatan literasi keuangan masyarakat, dan peningkatan aspek digital layanan keuangan.

Kemajuan dalam teknologi keuangan Islam merupakan keuntungan lain dari kerja sama lintas sektor. Bank-bank Islam kini memandang perusahaan fintech sebagai mitra strategis yang dapat membantu mereka meningkatkan cakupan layanan dan menyederhanakan operasional mereka. Sistem ekonomi Islam digital diharapkan dapat berkembang dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia melalui sinergi yang terencana dan berkelanjutan.

Perkembangan Keuangan di wilayah Eropa

Perkembangan keuangan Islam di wilayah Eropa sebagian besar terpusat pada sektor perbankan syariah serta segmen pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah (Wilson, 2015; Hassan & Lewis, 2007). Meskipun demikian, sejalan dengan ekspansi segmen tersebut, asuransi syariah berpotensi menjadi komponen tambahan penting bagi para konsumen yang menginginkan alternatif keuangan berbasis Islam. Sebagai ilustrasi, asuransi hipotek syariah dapat harmonis dengan berbagai instrumen keuangan Islam, terutama produk dan jasa perbankan ritel syariah. Pengelolaan kewirausahaan Islam di Eropa mengalami kemajuan signifikan paralel dengan pertumbuhan jumlah penduduk Muslim di benua ini, serta peningkatan pemahaman mengenai urgensi menjalankan usaha secara etis dan lestari. Konsep tersebut merujuk pada implementasi norma-norma syariah dalam berbagai dimensi bisnis, meliputi pengaturan sumber daya, strategi finansial, serta interaksi dengan konsumen, tenaga kerja, dan rekan bisnis.

Selain mengejar profit ekonomi, kewirausahaan Islam juga menyoroti kemakmuran sosial, kesetaraan ekonomi, serta moralitas dalam berbisnis. Para wirausahawan Muslim di Eropa secara aktif menggabungkan nilai-nilai Islam seperti integritas, keterbukaan, keadilan, serta tanggung jawab masyarakat dalam setiap tahapan operasional bisnis mereka (Juwaini, Herman, & Samad, 2023). Di Eropa, berbagai bidang usaha yang mengadopsi prinsip kewirausahaan Islam beroperasi berdasarkan regulasi syariah yang telah ditentukan, seperti pengharaman riba (bunga), maisir (judi), dan gharar (ketidakpastian atau spekulasi). Penerapan praktis dari prinsip ini terlihat dalam industri perbankan dan keuangan syariah yang menyediakan produk serta layanan bebas bunga. Pengelolaan kewirausahaan Islam secara konseptual di Eropa cenderung menitikberatkan pada pengintegrasian norma-norma syariah dengan praktik kewirausahaan kontemporer. Berikut adalah beberapa aspek utama yang umumnya diterapkan: Etika dan norma syariah, Inklusi sosial dan ekonomi, Pembiayaan syariah, Inovasi dan penyuaian, Kepemimpinan dan pengelolaan, serta Hasil bisnis dan kewajiban sosial, sambil tetap mematuhi nilai-nilai syariah yang dapat diterima dalam lingkungan pasar Eropa.

REKOMENDASI

1. Pertama, penguatan literasi kewirausahaan Islam perlu ditempatkan sebagai fondasi utama dalam pengembangan manajemen usaha syariah di era globalisasi. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa besarnya potensi demografis dan tingginya minat terhadap usaha berbasis syariah belum sepenuhnya diimbangi oleh pemahaman yang memadai mengenai prinsip, mekanisme, dan manajemen kewirausahaan Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan literasi kewirausahaan Islam melalui integrasi kurikulum di pendidikan formal, penguatan program pelatihan bagi pelaku UMKM, serta pemanfaatan platform digital sebagai sarana edukasi yang inklusif. Pembelajaran dari Eropa menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan yang terstruktur dan berbasis nilai mampu menciptakan pelaku usaha yang adaptif, profesional, dan berorientasi jangka panjang.
2. Kedua, pengembangan ekosistem kewirausahaan Islam yang terintegrasi menjadi rekomendasi strategis yang perlu diprioritaskan. Kewirausahaan Islam tidak dapat berkembang secara optimal

apabila hanya bertumpu pada inisiatif individu tanpa dukungan ekosistem yang kuat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dunia pendidikan, komunitas bisnis, serta regulator perlu diperkuat. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik di Eropa, di mana kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Ekosistem ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai ruang inkubasi, pendampingan manajerial, serta fasilitasi akses pasar global.

3. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital secara optimal dan beretika harus menjadi bagian integral dari manajemen kewirausahaan Islam. Globalisasi dan digitalisasi telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi, sehingga menuntut wirausaha Muslim untuk beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip syariah. Rekomendasi ini menekankan pentingnya pengembangan model bisnis digital syariah yang inovatif, transparan, dan berkeadilan. Pengalaman Eropa menunjukkan bahwa integrasi teknologi dengan prinsip etika dapat meningkatkan efisiensi sekaligus kepercayaan konsumen. Indonesia, dengan tingkat adopsi digital yang tinggi, memiliki peluang besar untuk mengembangkan kewirausahaan Islam berbasis teknologi yang mampu bersaing di pasar global.
4. Keempat, penguatan kerangka regulasi dan tata kelola (governance) kewirausahaan Islam perlu terus disempurnakan agar mampu menjawab tantangan globalisasi. Regulasi yang jelas, konsisten, dan adaptif terhadap inovasi menjadi prasyarat bagi tumbuhnya kepercayaan pelaku usaha dan investor. Indonesia dapat mengambil inspirasi dari pengalaman Eropa dalam mengharmonisasikan prinsip syariah dengan sistem hukum dan regulasi yang berlaku secara universal. Penguatan tata kelola ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan syariah, tetapi juga transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.
5. Kelima, orientasi kewirausahaan Islam perlu diarahkan tidak semata pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial dan keberlanjutan. Dalam konteks globalisasi yang kerap memicu ketimpangan dan eksploitasi sumber daya, kewirausahaan Islam memiliki keunggulan normatif melalui penekanan pada keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Rekomendasi ini mendorong pelaku usaha untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam strategi bisnis, sebagaimana telah banyak diterapkan di negara-negara Eropa. Dengan demikian, kewirausahaan Islam tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan.
6. Keenam, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi rekomendasi jangka panjang yang bersifat strategis. Pengalaman Indonesia dan Eropa menunjukkan bahwa kualitas manajemen kewirausahaan sangat ditentukan oleh kompetensi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai aspek teknis bisnis, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai Islam, etika global, serta dinamika pasar internasional. Program pengembangan kapasitas yang berkelanjutan akan menghasilkan wirausahawan Muslim yang profesional, berdaya saing, dan mampu menjadi agen perubahan di tingkat lokal maupun global.

Secara keseluruhan, rekomendasi ini menegaskan bahwa penguatan manajemen kewirausahaan Islam di era globalisasi memerlukan pendekatan yang holistik, integratif, dan berkelanjutan. Dengan memadukan pengalaman Indonesia yang kaya akan potensi dengan praktik terbaik dari Eropa yang telah matang secara sistem, kewirausahaan Islam dapat berkembang sebagai model usaha yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga berlandaskan nilai, etika, dan tanggung jawab sosial di tengah dinamika global.

SARAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan mengenai manajemen kewirausahaan Islam di era globalisasi dengan meninjau pengalaman Indonesia dan Eropa, penguatan peran seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong keberlanjutan pengembangan kewirausahaan berbasis nilai syariah. Pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan yang adaptif terhadap perubahan global, dukungan infrastruktur, serta kemudahan akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha. Penyesuaian kebijakan dengan dinamika ekonomi digital dan global perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kewirausahaan Islam mampu berkembang secara kompetitif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip etika dan keadilan. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah dan institusi pendukung kewirausahaan perlu memperluas perannya dalam membangun kapasitas pelaku usaha. Tidak terbatas pada fungsi penyaluran dana, lembaga-lembaga tersebut diharapkan mampu memberikan pendampingan manajerial, edukasi literasi keuangan dan digital, serta konsultasi usaha yang berkesinambungan. Pendekatan ini akan membantu pelaku usaha memahami risiko, mengelola keuangan secara profesional, serta memanfaatkan teknologi secara optimal dalam menjalankan bisnis berbasis syariah.

Pelaku usaha dan wirausahawan Muslim juga disarankan untuk terus meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis global. Penguasaan teknologi, inovasi model bisnis, serta pemahaman terhadap pasar internasional menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, proses adaptasi tersebut harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kemaslahatan bersama. Dengan mengintegrasikan nilai dan profesionalisme, kewirausahaan Islam dapat tampil sebagai alternatif model bisnis yang berdaya saing sekaligus beretika. Peran institusi pendidikan dan kalangan akademisi juga menjadi krusial dalam memperkuat fondasi kewirausahaan Islam. Pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, peningkatan riset aplikatif, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi syariah perlu terus ditingkatkan. Kolaborasi antara perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga keuangan syariah dapat menjadi sarana efektif untuk mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran etis dan sosial dalam berwirausaha.

Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kewirausahaan Islam sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu terus didorong. Masyarakat, khususnya generasi muda, diharapkan mampu melihat kewirausahaan Islam tidak semata sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan dukungan kesadaran kolektif, kewirausahaan Islam berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terakhir, kajian mengenai manajemen kewirausahaan Islam masih membuka ruang yang luas untuk pengembangan penelitian lanjutan. Penelitian ke depan dapat diarahkan pada studi empiris, analisis kebijakan yang lebih mendalam, atau pengukuran dampak sosial dan ekonomi dari penerapan kewirausahaan Islam di berbagai konteks wilayah. Pendekatan yang lebih beragam dan berbasis data lapangan diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan praktik kewirausahaan Islam di tingkat nasional maupun global.

REFERENSI

- Hakim, A. S. (2024). *Pengembangan fintech syariah di era digital: Peluang dan tantangan regulasi*. Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 1(3), 143–156.
- Hasanah, N. (2024). *Transformasi digital perbankan syariah di Indonesia: Peran kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 8(1), 55–68.

- Kurniawan, A. (2024). *Literasi keuangan digital syariah dan pengaruhnya terhadap pengembangan kewirausahaan UMKM*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 14(2), 101–115.
- Pramesti, D. A. (2024). *Regulasi fintech syariah di Malaysia dan relevansinya bagi Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 77–92.
- Aziz, A. (2013). *Etika bisnis Islam: Implementasi etika Islami untuk dunia usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Fatoni, A. (2022). Pengaruh ketidakpastian ekonomi terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2903–2909.
- Gusti, G. P. (2024). Transformasi industri keuangan dan perdagangan melalui fintech dan e-commerce: Studi analisis dampak dan tantangan. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 9(1), 64–74.
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan peluang di era digital. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 143–156.
- Hamizar, A., Tubalawony, J., & Yaman, A. (2024). Challenges in regulation and opportunities in sharia financial management. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(1), 50–62.
- Wilson, R. (2015). Islamic finance in Europe: Developments and challenges. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 32(3), 5–19.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Juwaini, A., Herman, D., & Samad, A. (2023). Islamic entrepreneurship and ethical business practices in Europe. *Journal of Islamic Business and Management*, 13(2), 145–160.
- Ojat Darajat, Sri Sumiyati. (2015). Pendidikan kewirausahaan. Konsep-konsep Dasar Kewirausahaan Entrepreneurship. Jurnal sman3kuningan.sch.id 30-45.
- Sandita, R. (2023). "Kewirausahaan Koperasi di Eropa". *Journal of Cooperative Management*, 11(1), 15-29.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. London: Islamic Research and Training Institute.